

BAB IV

FAKTOR PENDORONG TERBENTUKNYA KEBIJAKAN PENINGKATAN INVESTASI DI NTB

Investasi merupakan hal krusial yang dibutuhkan suatu daerah untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan guna memenuhi kesejahteraan masyarakat. Masuknya investasi memiliki efek positif yang beruntun dikarenakan sejumlah manfaat yang mengikutinya seperti meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di daerah melalui terbukanya sejumlah lapangan kerja yang baru. Selain itu, adanya investasi juga akan meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi seiring dengan dilakukannya transfer teknologi dan pengetahuan melalui masuknya investasi ke daerah. Di sisi lain, daya beli masyarakat, daya saing dan perekonomian masyarakat juga menjadi faktor utama yang paling berpengaruh ketika investasi masuk ke suatu daerah.

Sebagai faktor utama yang diperlukan untuk mempercepat tumbuh kembang ekonomi, pemerintah daerah kemudian melakukan berbagai upaya agar investasi yang masuk ke daerah terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada dasarnya, kegiatan investasi dapat terselenggara apabila hambatan – hambatan yang menjadi kendala bagi berlangsungnya kegiatan investasi di suatu daerah dapat dihilangkan/dieleminasi melalui penanganan yang baik oleh seluruh perangkat daerah baik pemerintah, pelaku usaha maupun

masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dilaksanakannya sejumlah kebijakan baik tertulis maupun operasional yang mendukung terlaksananya kegiatan investasi.

Pemerintah daerah pada khususnya akan melakukan sejumlah tindakan berupa penerbitan regulasi baru guna mereformasi kebijakan sebelumnya yang dinilai tidak mengakomodir iklim investasi. Dalam kasus ini, Pemerintah Provinsi NTB pun melakukan langkah yang serupa melalui pembentukan aturan baru yang mereformasi regulasi/peraturan sebelumnya di bidang penanaman modal guna meningkatkan investasi di NTB baik dari segi investasi asing maupun investasi dalam negeri. Sejumlah perbaikan terus dilakukan dalam berbagai sektor guna memperbesar peluang masuknya investasi di NTB baik dengan cara deregulasi maupun debirokratisasi. Selain karena alasan tersebut, terdapat sejumlah faktor – faktor pendorong dibalik terbentuknya kebijakan peningkatan investasi di NTB. Faktor – faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Di bawah ini akan di bahas secara rinci mengenai kedua faktor pendorong tersebut.

A. Faktor Internal Terbentuknya Kebijakan Peningkatan Investasi di NTB

1. Adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk melakukan de-regulasi terhadap aturan daerah yang menghambat investasi.

Salah satu faktor internal yang mendorong terbentuknya kebijakan peningkatan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk melakukan de-

regulasi terhadap seluruh aturan daerah baik peraturan daerah, peraturan gubernur maupun keputusan gubernur yang dianggap menghambat perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Siti Hadijah SH, MH, disebutkan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini mendorong seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk memberi perhatian lebih terhadap peningkatan ekonomi dengan memberikan kemudahan bagi investor dan membuka peluang investasi di daerah seluas – luasnya guna meningkatkan sekaligus memperbaiki ekonomi masyarakat.¹ Dalam hal ini, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk segera mengidentifikasi dan meninjau kembali peraturan – peraturan daerah yang bertentangan dengan undang – undang.

Dorongan ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo sejak awal masa jabatannya pada tahun 2014. Dalam pidato kenegaraannya pada saat awal terpilih serta pada peringatan HUT Republik Indonesia ke 70 pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menghimbau seluruh pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota di Indonesia untuk segera mengidentifikasi dan mengambil tindakan cepat dengan membatalkan dan merancang kembali seluruh peraturan daerah yang berpotensi menghambat investasi terutama pada sektor pertambangan, kehutanan serta perikanan dan kelautan.² Perda yang bermasalah selama ini dianggap sebagai batu sandungan besar dalam

¹ Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. “*wawancara*”. 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

² Tempo Bisnis. Pemerintah Fokus Deregulasi Kebijakan Ekonomi oleh Angelina Anjar Switri. <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/10/06/087810088/pemerintah-berfokus-deregulasi-kebijakan-ekonomi-di-daerah> diakses pada 20 Mei 2017.

upaya peningkatan investasi di daerah. Sulitnya prosedur pelayanan perizinan investasi hingga minimnya fasilitas infrastruktur menjadi hambatan terbesar investasi di daerah yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah.

Terkait hal ini, pemerintah pusat fokus untuk melakukan upaya deregulasi dan debirokratisasi terhadap paket kebijakan ekonomi di daerah disebabkan karena banyaknya kebijakan pemerintah pusat yang tidak berjalan maksimal ketika diimplementasikan di daerah. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar departemen hingga permasalahan sumber daya masyarakat yang kurang memadai. Oleh karena itu, pemerintah pusat kemudian menekankan untuk melakukan de-regulasi guna meningkatkan investasi di daerah dalam rangka merespon terjadinya perlambatan ekonomi yang melanda di Indonesia selama beberapa waktu terakhir.

Selain itu, upaya de-regulasi terhadap aturan daerah yang menghambat investasi juga dilakukan untuk menekan angka urbanisasi dan melakukan pemerataan pembangunan. Tidak meratanya peredaran uang dan pembangunan di Indonesia disebabkan oleh terhambatnya investasi di daerah. Dengan dilakukannya de-regulasi dan de-birokratisasi ini, diharapkan kedepannya investasi dari dalam dan luar negeri dapat mengalir ke daerah sehingga realisasi investasi daerah dapat dipacu setinggi mungkin.³ Dengan ini, pemerataan pembangunan dapat terwujud melalui masuknya investasi yang juga dapat menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Daerah – daerah yang mengalami

³ The Presiden Post Indonesia. Jokowi dorong investasi di daerah. <http://thepresidentpostindonesia.com/2014/08/11/jokowi-dorong-investasi-di-daerah/> diakses pada 20 Mei 2017.

ketimpangan ekonomi menjadi prioritas besar bagi pemerintah pusat untuk memperoleh aliran investasi.

Upaya ini dilakukan dengan melakukan reformasi dan pembaharuan terhadap aturan yang berlaku sebelumnya sehingga dapat berkompetisi dengan perkembangan kompetisi global saat ini. Bentuk nyata dari dorongan pemerintah pusat ini dikukuhkan melalui dikeluarkannya sejumlah paket kebijakan ekonomi untuk mempercepat peningkatan ekonomi nasional. Keseluruhan paket kebijakan ekonomi tersebut membutuhkan dan melibatkan upaya dari pemerintah daerah dalam hal persiapan hingga eksekusi kebijakan. Bahkan tujuh dari 12 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pusat hingga tahun 2016 silam berkaitan dengan upaya penguatan investasi di daerah.⁴

Dalam paket kebijakan ekonomi I, poin utama yang ditegaskan yakni upaya untuk mendorong daya saing industri nasional yang dilakukan dengan cara de-regulasi, mempermudah dan menyederhanakan birokrasi baik di tingkah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menegakkan payung hukum serta memberikan jaminan kepastian usaha. Kemudian poin selanjutnya yang tercantum dalam paket kebijakan ekonomi I, yakni upaya untuk mempercepat proyek strategis nasional melalui penghapusan segala hambatan investasi dengan menyederhanakan perizinan, menyelesaikan permasalahan tata ruang maupun penyediaan lahan, mempercepat pengadaan barang maupun jasa, adanya kebijaksanaan dalam hal penyelesaian sengketa dan memberikan jaminan perlindungan hukum

⁴ Sindo News. Ekonomi dan Bisnis. <https://ekbis.sindonews.com/read/1106764/33/jokowi-perputaran-uang-tinggi-dorong-pertumbuhan-ekonomi-1462614274> diakses pada 20 Mei 2017.

serta memberikan dukungan bagi kepala daerah untuk melakukan percepatan proyek – proyek strategis nasional. Poin yang ketiga yakni meningkatkan investasi di sektor properti melalui adanya kebijakan yang merangsang pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menawarkan peluang investasi yang lebih besar bagi investor di sektor properti.

Paket kebijakan ekonomi I ini kemudian diikuti dengan pembentukan paket kebijakan ekonomi II yang merupakan *follow up* atas kebijakan sebelumnya yang masih berfokus pada upaya deregulasi dan debirokratisasi terhadap aturan daerah yang menghambat peningkatan investasi. Pada paket kebijakan ekonomi II ini kemudian dibentuk sejumlah kebijakan praktis dalam hal pelaksanaan perizinan investasi. Kebijakan – kebijakan yang dibentuk yakni pembentukan layanan perizinan investasi 3 jam terutama dengan memberikan prioritas bagi investasi di kawasan industri yang memiliki nilai investasi minimal Rp.100 miliar dengan penggunaan 1000 tenaga kerja lokal. Kebijakan selanjutnya yang dibentuk yakni menghilangkan izin sektor kehutanan dari total 14 lisensi menjadi 6 lisensi. Pemerintah pusat juga mempercepat SOP untuk penerbitan *Tax Allowance* dan membebaskan PPN hingga memberikan insentif pengurangan pajak deposito.⁵

[Sehubungan dengan diterbitkannya sejumlah paket kebijakan ekonomi tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelaksanaannya dengan turut melakukan penyesuaian dan harmonisasi terhadap aturan daerah sehingga berkesesuaian dengan](#)

⁵ BKPM RI. Investasi di Indonesia. <http://www.bkpm.go.id/id/investasi-di-indonesia/kebijakan-ekonomi> diakses pada 20 Mei 2017.

kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB kemudian mulai merancang pembentukan Perda nomor 3 tahun 2015 tentang Penanaman Modal sebagai bentuk tindak lanjut atas kebijakan paket ekonomi dan dorongan pemerintah pusat terkait dengan upaya peningkatan investasi di daerah. Perda Penanaman Modal ini memiliki cakupan yang cukup luas dan mengatur tentang pemberian kemudahan – kemudahan termasuk kemudahan perizinan serta jaminan kepastian hukum hingga peluang investasi kepada investor yang diwujudkan melalui penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dikukuhkan melalui SK Gubernur NTB mengenai pendelegasian sebagian kewenangan gubernur kepada Kepala BKPM PTSP NTB terkait penandatanganan urusan perizinan investasi dan pembentukan Perda Penanaman Modal ini resmi mengakhiri kerumitan birokrasi dan pelayanan perizinan di NTB selama ini. Sebelumnya, pelayanan perizinan investasi di NTB dapat memakan waktu yang cukup lama karena rumit dan berbelit – belitnya persyaratan birokrasi yang harus di tempuh oleh investor. Pasca dilakukannya de-regulasi kebijakan daerah atas dorongan pemerintah pusat, prosedur pelayanan perizinan investasi di NTB kini hanya memakan waktu 3 jam mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan izin investasi. Hal ini menandakan bahwa pelayanan perizinan di NTB pasca terbentuknya aturan ini telah menjadi lebih mudah, cepat, transparan dan tidak berbelit – belit.

Diterbitkannya kebijakan baru dalam bentuk Perda Penanaman Modal yang ditegaskan melalui pemberlakuan sistem pelayanan terpadu satu pintu di NTB merupakan salah satu syarat yang harus

dipenuhi pemerintah daerah dalam rangka menyambut dan
menyukseskan paket kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk
meningkatkan iklim investasi nasional maupun daerah. Paket kebijakan
ekonomi mensyaratkan diberlakukannya kemudahan perizinan investasi
di setiap daerah. Oleh karena itu, segala aturan daerah yang sebelumnya
memperlambat investasi terutama yang disebabkan karena rumitnya
pelayanan perizinan, harus segera digantikan dengan aturan baru yang
pro investasi.

Selain de-regulasi melalui pencabutan maupun pembatalan serta
pembentukan kembali terkait aturan investasi, upaya peningkatan
investasi di daerah yang digalakkan pemerintah pusat ini membutuhkan
upaya nyata dalam bentuk praktis. Pemerintah pusat kemudian juga
mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan dan
mempercepat pembangunan dan pengembangan infrastruktur di daerah
agar dapat mengakomodir kebutuhan dunia usaha dan investasi.⁶ Dalam
perkembangannya untuk merespon himbauan ini, Pemerintah Provinsi
NTB kemudian membentuk dan menerbitkan Perda nomor 9 tahun
2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis pola
pembiayaan tahun jamak. Peraturan daerah ini berupaya untuk
menggalakkan dan mengkatrol pembangunan infrastruktur di daerah
terutama jalan dan jembatan yang menjadi motor penggerak
perekonomian dan unsur penting bagi mobilisasi masyarakat.

Perda ini merupakan salah satu bentuk upaya nyata Pemerintah
Provinsi NTB untuk memperbaiki perekonomian dan taraf hidup
masyarakat melalui peningkatan investasi. Selama ini, banyak investor

⁶ Oke zone Ekonomi. Paket kebijakan ekonomi.
<http://economy.okezone.com/read/2016/08/17/320/1466273/paket-kebijakan-ekonomi-dorong-investasi-daerah> diakses pada 20 Mei 2017.

telah menunjukkan minatnya setelah melihat potensi daerah NTB, namun realisasi investasi masih belum tergarap secara optimal karena timbulnya berbagai halangan baik fisik maupun prosedural yang belum menunjang iklim investasi seperti akses jalan yang pembangunannya belum dilakukan secara menyeluruh pada tahun – tahun sebelum 2015 hingga masih terjadinya defisit listrik di NTB.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMPTSP) NTB menunjukkan bahwa akses terkait jalan di NTB secara total baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten mencapai panjang total hingga 7.641,1 km dengan 72,54% jalan nasional dan 48,40% jalan provinsi diantaranya berada dalam kondisi baik.⁷ Selain untuk merespon himbuan pemerintah pusat, perda percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis ini kemudian juga dibentuk untuk mengatasi permasalahan minimnya fasilitas infrastruktur utama di NTB.

[Dalam perkembangannya, sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat untuk meningkatkan iklim investasi di daerah melalui dorongan pembentukan perda yang pro investasi dan menawarkan kemudahan perizinan, pada 29 Januari 2016, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri kemudian mengumumkan pembatalan 3.143 perda yang dianggap bermasalah.⁸ Dari total angka tersebut, 1765 diantaranya merupakan perda/perkada kabupaten/kota yang](#)

⁷ BKPM PTSP NTB. Penduduk dan Tenaga Kerja. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/informasi-umum/penduduk-dan-tenaga-kerja> diakses pada 1 Februari 2017.

⁸ Kemendagri RI. Presiden umumkan pembatalan perda bermasalah, <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/13/presiden-umunkan-pembatalan-3143-perda-bermasalah> diakses pada 20 Mei 2017.

dicabut oleh Mendagri, 111 permendagri yang dicabut oleh Mendagri, dan 1267 perda/perkada yang dicabut oleh Gubernur.⁹

Perda – perda yang dibatalkan tersebut merupakan perda yang dianggap bertentangan dengan Undang – Undang yang lebih tinggi, perda yang menghambat perekonomian daerah melalui pembebanan berbagai tarif kepada masyarakat, perda yang berpotensi menghambat investasi dikarenakan rumit dan panjangnya jalur birokrasi perizinan yang harus ditempuh oleh investor, serta perda yang menghambat kemudahan berusaha. Selama ini, Indonesia setidaknya memiliki 42.000 jenis aturan.¹⁰

Banyak dari aturan tersebut tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak terbentuk. Pembatalan perda dalam jumlah banyak tersebut dianggap perlu dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengintensifkan dan meningkatkan efisiensi paket kebijakan ekonomi yang tengah berjalan.

Namun sayangnya, Mahkamah Konstitusi kemudian mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembatalan perda.¹¹ Melalui adanya pencabutan kewenangan ini, pemerintah pusat kemudian menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah yang belum melakukan de-regulasi atas aturan daerah yang menghambat investasi

⁹ Sekretaris Kabinet RI. Kemendagri umumkan perda yang dibatalkan. <http://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/> diakses pada 20 Mei 2017.

¹⁰ VOA Indonesia. Pemerintah batalkan perda yang hambat investasi. <http://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-batalkan-ribuan-perda-yang-hambat-investasi-/3373855.html> diakses pada 20 Mei 2017.

¹¹ Kompas Nasional. Presiden Hormati Putusan MK. <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/07/21021341/presiden.hormati.putusan.mk.terkait.wewenang.mendagri.mencabut.perda> diakses pada 20 Mei 2017.

agar segera meninjau kembali, mencabut kemudian membentuk dengan cepat peraturan – peraturan daerah yang dapat menunjang iklim investasi di daerah melalui pemangkasan proses perizinan. Sistem perizinan yang mudah dan fleksibel merupakan kunci utama yang diperlukan untuk mengundang investor masuk dan berinvestasi di daerah sehingga daerah dapat bersaing dengan kompetisi global.

Untuk itu, pemerintah pusat kemudian mengumpulkan seluruh biro hukum tingkat pemerintah provinsi se-indonesia untuk melakukan pembahasan terkait masalah ini. Dikarenakan hilangnya wewenang Menteri Dalam Negeri untuk mencabut perda, pemerintah pusat kemudian mendorong Gubernur, Bupati maupun Walikota di seluruh Indonesia untuk mengambil tindakan nyata guna meningkatkan investasi di daerah dengan meninjau kembali dan mencabut perda – perda yang dianggap menghambat investasi.¹² Gubernur dalam hal ini memiliki wewenang untuk membatalkan perda sesuai dengan yang diamanatkan UU Pemerintah Daerah Pasal 251 ayat 3. Pembatalan ditindaklanjuti dengan pemberhentian pelaksanaan perda dan pencabutan perda yang dibatalkan.¹³

Biro hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat merespon himbauan pusat ini dengan menerbitkan Perda Penanaman Modal. Pencabutan dan pembatalan tidak dilakukan karena sebelumnya belum ada aturan daerah tertulis yang secara eksplisit mengatur tentang penanaman modal. Dalam perkembangannya, Perda Penanaman Modal ini

¹² JDIH Kemendagri. Instruksi Menteri Pencabutan Perda. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/materi/INMEN_PENCABUTAN_PERDA.pdf diakses pada 20 Mei 2017.

¹³ Hukum Online. Mekanisme Pencabutan Perda. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ff81fd70ea/begini-mekanisme-pencabutan-peraturan-daerah> diakses pada 20 Mei 2017.

dikuatkan juga dengan diterbitkannya SK Gubernur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Gubernur Kepada Kepala BKPM PTSP NTB terkait penandatanganan perizinan investasi di NTB. Perda Penanaman Modal dan SK pendelegasian kewenangan ini kemudian menandai diterapkannya sistem pelayanan terpadu satu pintu di NTB yang memberikan kemudahan berinvestasi di NTB melalui cepatnya proses pelayanan perizinan investasi.

2. Terpilihnya wilayah Mandalika di NTB sebagai salah satu dari 8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia.

Faktor internal lain yang mendorong terbentuknya kebijakan peningkatan investasi di Nusa Tenggara Barat adalah terpilihnya wilayah Mandalika yang berlokasi di Lombok Tengah, NTB, sebagai salah satu dari delapan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan sebuah wilayah yang secara geografis dan yurisdiktif dipilih karena keunggulan aspek geostrategis maupun geoekonominya guna menjalankan fungsi perekonomian dan berperan sebagai kawasan perdagangan bebas.¹⁴

Daerah yang terpilih sebagai KEK akan memiliki peraturan ekonomi khusus yang sedikit berbeda dengan daerah lainnya serta akan memperoleh fasilitas tertentu dari pemerintah pusat. Secara khusus, daerah – daerah yang menyandang status KEK juga akan menjalankan kegiatan industri, ekspor, impor maupun kegiatan ekonomi lainnya yang pada umumnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berdaya saing internasional.

¹⁴ Kompasiana. Kawasan Ekonomi Khusus. http://www.kompasiana.com/maniksukoco/apa-yang-dimaksud-dengan-kawasan-ekonomi-khusus_5892f62895937356294ef48a diakses pada 20 Mei 2017.

Di Indonesia, KEK dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi dengan melibatkan partisipasi penuh dari daerah yang terpilih sebagai KEK. KEK diharapkan besar dapat mengkonduksikan iklim investasi di daerah dan menarik investor dengan menawarkan berbagai kemudahan di bidang fiskal, perpajakan, kepabeanan, kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan, imigrasi hingga jaminan keamanan di KEK. Dianalisis dari segi legislasi, aturan mengenai KEK diterbitkan pada tahun 2009 melalui adanya UU nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan PP no 2 tahun 2011 tentang penyelenggaraan KEK.

Pada umumnya, daerah yang terpilih sebagai KEK merupakan daerah – daerah yang memiliki kriteria kekhususan daerah seperti memiliki keunggulan lokalitas dan geografis baik dari segi keindahan alam maupun potensi daerah yang kompetitif dan tidak ada bandingannya dengan daerah lain, kemudian letak daerah yang berdekatan dengan negara tetangga atau berbatasan langsung dengan jalur perdagangan dunia hingga kepemilikan daerah atas SDA dan industri hulu hilir yang terpadu.¹⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB, Ibu Siti Hadijah, SH, MH, terpilihnya wilayah Mandalika di Provinsi NTB sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus ini telah melalui proses

¹⁵ BKPM RI. Mendorong investasi melalui KEK. <http://www.bkpm.go.id/id/artikel-investasi/readmore/mendorong-investasi-melalui-kawasan-ekonomi-khusus-kek> diakses pada 20 Mei 2017.

pemilihan yang panjang dan bersaing dengan 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Pemilihan Mandalika sebagai KEK dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang KEK Mandalika yang dikeluarkan pada 30 Juni 2014.¹⁶

Wilayah Mandalika terpilih karena keunggulan lokalitasnya yang dibuktikan dengan keindahan panorama alam dan keunggulan wisata bahari yang berbasis lingkungan. Dari 34 total provinsi di Indonesia, hanya 8 wilayah saja yang terpilih sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia yakni Mandalika di NTB sebagai KEK sektor pariwisata, Tanjung Lesung di Banten sebagai KEK sektor pariwisata, Sei Mangkei di Sumatera Utara sebagai KEK sektor industri hilirisasi kelapa sawit dan karet, logistik, energi, industri dan pariwisata.

Kemudian Kota Palu di Sulawesi Tengah sebagai KEK sektor industri pertambangan, pengolahan kakao, karet, rotan, rumput laut, industri manufaktur alat berat, otomotif, elektrik, elektronik dan logistik. Selanjutnya terdapat wilayah Bitung, Sulawesi Utara sebagai KEK sektor industri perikanan dan pengolahan agro serta logistik. Lalu wilayah Pulau Morotai, Maluku Utara sebagai KEK sektor industri pengolahan ikan, manufaktur, logistik dan pariwisata. Kemudian wilayah Tanjung Api – Api di Sumatera Selatan sebagai KEK sektor industri karet, kelapa sawit dan petrokimia. Terakhir yakni wilayah

¹⁶ Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. “*wawancara*”. 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kalimantan Timur yang merupakan KEK sektor industri kelapa sawit dan logistik.¹⁷

KEK Mandalika yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Lombok Tengah ini berperan menjalankan fungsi perekonomian sebagai kawasan ekonomi berciri industri agro dan ekowisata yang menawarkan keindahan panorama alam dengan luas total wilayah mencapai 1.250 Ha. Pengelolaan KEK Mandalika ditetapkan pemerintah pusat berada di bawah yurisdiksi PT *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) dengan nilai investasi pembangunan kawasan sekitar Rp. 2,2 triliun yang berpotensi menarik investasi sebesar Rp. 63,8 triliun.

Industri pariwisata yang ditargetkan berkembang di wilayah Mandalika adalah MICE, hotel, villa, apartemen, *golf zone*, *diving*, *snorkling*, *yachting*, sekolah pariwisata, rumah tradisional, pusat perayaan kebudayaan hingga pusat pemasaran keunikan produk lokal. Kawasan Mandalika ditargetkan dapat menampung sekitar 20 hotel dengan kelas bintang lima dan berstandar internasional. Saat ini telah terdapat dua hotel bintang lima yang tengah menanamkan investasinya dan sedang berada dalam tahap pembangunan sebelum beroperasi pada 2018 mendatang yakni Hotel Pullman dan Clubmed.

Sejak diresmikan pada 12 Desember 2015, sejauh ini, telah terdapat lima investor yang menandatangani MoU dengan PT ITDC untuk berinvestasi di KEK Mandalika, yakni PT Metro Lestari Utama untuk pembangunan hotel bintang lima dengan investasi mencapai Rp.

¹⁷ Tempo Bisnis. Daftar Kawasan Ekonomi Khusus. <https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/05/18/090876295/ini-daftar-11-kawasan-ekonomi-khusus-dan-peluang-investasinya> diakses pada 20 Mei 2017.

250 miliar, *Sky Wealth Malaysia* dengan prospek hotel bintang lima bernilai investasi Rp. 450 miliar, PT Bangun Megatama Wisata Mahadewi dengan pembangunan hotel, PT Alam Hijau Permai dengan pembangunan Pullman Hotel dan *Jeju Olle Foundation* untuk pembangunan *Olle Walking Trail*.¹⁸

[Terpilihnya sejumlah kawasan di Indonesia sebagai KEK termasuk Mandalika pada dasarnya merupakan upaya pemerintah pusat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah. KEK dalam hal ini berfungsi sebagai infrastruktur penggerak ekonomi yang ditujukan untuk mendorong masuknya investasi.](#)

[Dengan alasan ini, pemerintah pusat bahkan memprioritaskan program KEK untuk masuk menjadi bagian paket kebijakan ekonomi VI yang menekankan adanya pemberian paket insentif untuk kawasan ekonomi khusus seperti dengan memberikan Tax Holiday 20 hingga 100% untuk 10 – 25 tahun. Hal ini juga dikukuhkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah \(PP\) nomor 96 tahun 2015 tentang fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus yang mensyaratkan pemerintah di daerah yang terpilih sebagai KEK untuk memberikan insentif kemudahan bagi investor yang berinvestasi di KEK.](#)¹⁹

[Terlepas dari berbagai keistimewaan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada wilayah Mandalika yang merupakan bagian dari KEK, terdapat juga sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat guna](#)

¹⁸ BPHN. Daftar Investasi mandalika. <http://www.bphn.go.id/data/documents/14kp046.pdf> diakses pada 20 Mei 2017.

¹⁹ KEK. Mengapa Indonesia. <http://kek.go.id/mengapa-indonesia/peraturan-perundangan/> diakses pada 20 Mei 2017.

mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan kebijakan pusat dengan daerah. Menanggapi terpilihnya Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi VI serta PP nomor 96 tahun 2015, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kemudian merespon cepat dengan mengakomodir kebijakan pusat melalui upaya membentuk dan memberlakukan Perda nomor 8 tahun 2016 yang memberikan insentif keringanan pajak daerah dan retribusi daerah di KEK Mandalika.

Bentuk pemberian insentif kemudahan pajak yang diatur dalam perda tersebut adalah pengurangan, keringanan sebesar 50% dari pokok pajak terhutang dan sanksi administrasi hingga pembebasan atas pajak daerah dan retribusi daerah. Jenisnya yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

Pembentukan perda tersebut merupakan tanggapan cepat pemerintah daerah setempat atas klasifikasi KEK yang disyaratkan pemerintah pusat untuk diberlakukan guna menarik investor. Pemerintah pusat mensyaratkan agar setiap wilayah yang terpilih sebagai KEK memberikan kemudahan – kemudahan dan prioritas kepada investor dalam bentuk adanya kemudahan pengurusan perizinan investasi dengan memberlakukan sistem pelayanan terpadu satu pintu (*one stop service*) yang memberikan pelayanan cepat hanya dalam waktu 3 jam, memberikan insentif perpajakan melalui *Tax Holiday* dan *Tax Allowance* (pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 10-25 tahun kepada badan usaha yang berinvestasi lebih dari Rp.1 triliun, pengurangan PPh 20-100% selama 5-15 tahun dengan nilai investasi

lebih dari Rp.15 milyar, PPh atas deviden sebesar 10% serta kompensasi kerugian 5-10 tahun).²⁰

Selain itu terdapat kemudahan kepabeanan (pembebasan dan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, hingga pemberlakuan SKA), kemudahan aspek PPN&PPNBM, kemudahan imigrasi (fasilitas visa kunjungan 30 hari dengan diperpanjang selama 5 kali dengan total masing – masing 30 hari, *multiple* visa yang berlaku satu tahun, izin tinggal bagi WNA yang memiliki properti di KEK, serta izin tinggal bagi WNA lanjut usia yang tinggal di KEK Pariwisata), kemudahan ketenagakerjaan, kemudahan pengurusan pertanahan, hingga kemudahan pengurusan kepemilikan properti bagi WNA.²¹

Dalam hal ini, Perda nomor 8 tahun 2016 hanya mengatur 4 jenis kemudahan pajak daerah dan retribusi dikarenakan pemerintah provinsi hanya memiliki wewenang pada empat jenis pajak tersebut. Pajak lainnya merupakan yurisdiksi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota. Dalam perkembangannya, pemberian insentif kemudahan yang dikukuhkan melalui penerbitan perda ini diharapkan dapat mendorong investasi yang masuk ke NTB khususnya di area KEK Mandalika yang memiliki nilai jual dari sektor pariwisata.

²⁰ KEK. One Stop Service. <http://kek.go.id/mengapa-indonesia/one-stop-service/> diakses pada 20 Mei 2017.

²¹ KEK. Living Environment. <http://kek.go.id/mengapa-indonesia/living-environment/> diakses pada 20 Mei 2017.

3. Belum maksimalnya realisasi investasi di NTB selama beberapa tahun terakhir.

Salah satu faktor penting yang mendorong Pemerintah Provinsi NTB membentuk kebijakan – kebijakan peningkatan investasi di NTB yakni dikarenakan belum maksimalnya realisasi investasi di NTB selama beberapa tahun terakhir.²² Pada umumnya, investasi asing khususnya dalam jenis investasi langsung di daerah kerap kali menemui sejumlah kendala seperti adanya kesulitan ekonomis dan politis dengan daerah tujuan investasi, adanya persyaratan kedudukan personalia, manajemen lokasi maupun waktu hingga faktor daerah penerima yang terlampaui terikat dengan peraturan / kebijakan lama yang kurang kondusif dengan kondisi maupun situasi pada saat ini.²³

Hal – hal tersebut merupakan batu sandungan besar dalam upaya peningkatan investasi di daerah. Di NTB pada khususnya, pada beberapa tahun sebelumnya terutama 2011 hingga 2014, terdapat banyak sekali hambatan/kendala dalam hal menanamkan investasi terutama investasi asing. Investor asing dalam jumlah besar kerap kali melirik Provinsi NTB untuk menanamkan modalnya dan mengembangkan usaha, namun upaya investasi di NTB belum berjalan maksimal karena berbagai hambatan seperti kurangnya akses jalan yang memadai, masih terjadinya defisit kapasitas listrik hingga ketatnya kebijakan persyaratan perizinan investasi di NTB.

Faktor tersebut membuat realisasi investasi di NTB selama beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi berkepanjangan dan hanya

²² Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. “wawancara”. 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

²³ Sidik Jatmika. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional*. 2001. BIGRAF Publishing : Yogyakarta.

mampu sedikit memenuhi target nasional. Pada beberapa tahun tertentu, PMA di NTB bahkan mengalami penurunan yang cukup drastis dan tergolong mengkhawatirkan. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia, realisasi investasi di NTB tergolong kecil dan belum ampu bersaing secara kompetitif dengan wilayah lainnya yang pada umumnya memiliki potensi daerah yang sama dengan Provinsi NTB.

Belum maksimalnya perolehan realisasi investasi di NTB ini berefek pada belum teroptimalkannya potensi daerah yang cukup besar di NTB. Hal ini menjadi konsen besar pemerintah daerah selama beberapa tahun terakhir. Sebagai pembuktian data, berikut penulis akan mencantumkan tabel data yang menunjukkan realisasi investasi PMDN maupun PMA Provinsi NTB pada tahun 2014 yang dibandingkan dengan wilayah – wilayah lain se-Indonesia.

Belum maksimalnya capaian investasi di NTB sebelum tahun 2015 ini juga ditunjukkan melalui capaian realisasi investasi yang hanya mampu mencapai target nasional dan RPJMD namun belum mampu menjangkau nilai batas tertinggi investasi secara keseluruhan. Proyek – proyek investasi yang tersebar ada masing – masing sektor pun berjumlah sangat minim. Hal ini dapat dideteksi melalui rincian target dan capaian realisasi investasi di NTB setiap tahunnya sebelum 2015. Pada tahun 2012, rencana investasi di NTB menargetkan investasi PMDN dapat mencapai angka Rp. 215,9 miliar dengan target PMA sebesar US\$ 55 juta.²⁴ Tabel di bawah ini menerangkan rencana investasi dan tenaga kerja baik PMDN maupun PMA.

²⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2013. *NTB Dalam Angka 2013*. Mataram, NTB. Melalui <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2013/>

Tabel 4.2 Rencana Investasi dan Tenaga Kerja PMDN/PMA Menurut Sektor Ekonomi di NTB 2012

Sektor Ekonomi <i>Economic Sector</i>	Jumlah Proyek <i>Project</i>	Investasi <i>Investment</i> (Ribu Rp/US\$)	Tenaga Kerja <i>Worker</i> (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PMDN / Domestic Investment	6	215.910.584	139
1. Pertanian Tanaman Pangan <i>Agriculture for Food Crops</i>	1	15.250.000	100
2. Perkebunan / Estate	-	-	-
3. Peternakan / Livestock	-	-	-
4. Perikanan / Fishery	-	-	-
5. Kehutanan / Forestry	-	-	-
6. Pertambangan / Mining	-	-	-
7. Industri / Industry	-	-	-
8. Pariwisata / Tourism			
a. Perhotelan	1	3.860.584	-
b. Jasa Wisata	1	3.000.000	12
9. Perhubungan / Communication	-	-	-
10. Ketenagalistrikan	1	187.950.000	-
11. Jasa-jasa / Services	2	5.850.000	27
II. PMA / Foreign Investment	27	55.193,33	515
1. Pertanian Tanaman Pangan <i>Agriculture for Food Crops</i>	-	-	-
2. Perkebunan / Estate	-	-	-
3. Peternakan / Livestock	-	-	-
4. Perikanan / Fishery	-	-	-
5. Kehutanan / Forestry	-	-	-
6. Pertambangan / Mining	2	8.723,67	73
7. Industri / Industry	1	519	50
8. Pariwisata / Tourism			
a. Perhotelan	15	29.975,22	365
b. Jasa Wisata	1	1.200	15
9. Perhubungan / Communication	-	-	-
10. Jasa-jasa / Services	8	14.775	12

Sumber : BKPM & PT Provinsi Nusa Tenggara Barat
Source : Investment Coordinating Board and Integrated License Services
of Nusa Tenggara Barat Province

Sumber : NTB Dalam Angka 2013 mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2013/>

Pada tabel tersebut, proyek investasi untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) ditargetkan dapat mencapai enam proyek melalui penggunaan sektor pertanian tanaman pangan, pariwisata dalam hal perhotelan dan jasa wisata, serta ketenagalistrikan maupun jasa – jasa lainnya. Pemerintah juga menargetkan tenaga kerja yang dapat digunakan untuk menunjang investasi PMDN ini dapat mencapai angka sebesar 139 total tenaga kerja. Sedangkan dari segi investasi asing (PMA), proyek investasi ditargetkan dapat mencapai 27 proyek dengan target penggunaan tenaga kerja sebesar 515 orang melalui

pemanfaatan sektor pertambangan, industri, perhotelan, jasa wisata maupun jasa – jasa lainnya.

Dalam perkembangannya, realisasi investasi di NTB pada tahun 2012 mencapai total nilai sebesar Rp.1.7 triliun dengan rincian PMDN mencapai total Rp.738,6 miliar dan PMA bernilai investasi sebesar US\$ 115 juta atau setara dengan Rp.1.03 triliun. Pada tahun ini, nominal investasi tersebut merupakan penjabaran dari investasi pemodal baik dalam negeri maupun asing dengan berdirinya sebanyak 79 perusahaan, dimana 18 perusahaan diantaranya merupakan investasi dalam negeri (PMDN) dan 61 perusahaan lainnya merupakan investasi asing (PMA).²⁵ Realisasi investasi pada tahun ini ditinjau jauh melampaui target rencana investasi 2012 yang dicanangkan dalam RPJMD Provinsi NTB. Namun perlu untuk digarisbawahi, walaupun mencapai target, realisasi investasi PMA pada tahun ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi PMA pada tahun 2011 yang berhasil mencapai US\$ 164,5 miliar. Pada tahun ini PMA yang diperoleh hanya berkisar pada US\$ 115 miliar saja.

Terlepas dari itu, pada tahun 2012, tenaga kerja yang diserap melalui PMDN mencapai total hingga 53 orang sedangkan tenaga kerja yang diserap melalui investasi asing (PMA) mencapai total hingga 5.613 orang. Proyek PMDN yang dicapai pada tahun 2012 yakni sebesar 18 proyek melalui pemanfaatan sektor perhotelan, jasa wisata maupun jasa lainnya. Sayangnya sektor pertanian tanaman pangan yang ditargetkan dapat dicapai realisasi investasinya oleh Pemerintah

²⁵ BKPM PTSP NTB. Realisasi Investasi 2012. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/capaian-kinerja/realisasi-investasi#tahun-2012> diakses pada 1 Februari 2017.

Provinsi NTB pada tahun 2012 ini tak dapat terlaksana dikarenakan tidak adanya investor yang menanamkan modal pada sektor ini.

Kemudian, dari segi investasi asing, proyek investasi asing yang dapat dijalankan pada tahun 2012 mencapai sebesar 61 proyek dengan fokus investasi pada sektor yang justru tidak ditargetkan sebelumnya oleh pemerintah daerah setempat yakni sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan.²⁶ Sektor lainnya yang dicapai sesuai dengan target yakni sektor pertambangan, sektor industri, sektor pariwisata melalui perhotelan maupun jasa wisata serta jasa – jasa lainnya. Tabel di bawah ini menunjukkan rincian realisasi investasi baik PMDN maupun PMA yang terbagi menjadi sejumlah sektor ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012.

²⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2013. *NTB Dalam Angka 2013*. Mataram, NTB. Melalui <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2013/>

Tabel 4.3 Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja PMDN/PMA Menurut Sektor Ekonomi di NTB 2012

Sektor Ekonomi <i>Economic Sector</i>	Jumlah Proyek <i>Project</i>	Investasi <i>Investment</i> (Ribu Rp/US\$)	Tenaga Kerja <i>Worker</i> (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PMDN / Domestic Investment (Ribu Rp.)	18	738.608.218	53
1. Pertanian Tanaman Pangan <i>Agriculture for Food Crops</i>	-	-	-
2. Perkebunan / Estate	-	-	-
3. Peternakan / Livestock	-	-	-
4. Perikanan / Fishery	-	-	-
5. Kehutanan / Forestry	-	-	-
6. Pertambangan / Mining	-	-	-
7. Industri / Industry	-	-	-
8. Pariwisata / Tourism			
a. Perhotelan	6	102.697.887	30
b. Jasa Wisata	1	200.000	-
9. Perhubungan / Communication	-	-	-
10. Jasa-jasa / Services	11	635.710.331	23
II. PMA / Foreign Investment (US \$.000)	61	115.447	5.613
1. Pertanian Tanaman Pangan <i>Agriculture for Food Crops</i>	1	738	24
2. Perkebunan / Estate	2	428,7	66
3. Peternakan / Livestock	-	-	-
4. Perikanan / Fishery	3	941	184
5. Kehutanan / Forestry	-	-	-
6. Pertambangan / Mining	1	105.328,09	4.297
7. Industri / Industry	2	729	71
8. Pariwisata / Tourism			
a. Perhotelan	28	3.609	705
b. Jasa Wisata	6	964	125
9. Perhubungan / Communication	-	-	-
10. Jasa-jasa / Services	18	2.709	141

Sumber : BKPM & PT Provinsi Nusa Tenggara Barat
Source : Investment Coordinating Board and Integrated License Services
of Nusa Tenggara Barat Province

Sumber : NTB Dalam Angka 2013 mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2013/>

Jika dipantau berdasarkan asal negaranya, investasi asing di NTB berasal dari berbagai negara yang telah sejak lama menjalin hubungan baik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara khusus memiliki ketertarikan besar akan komoditi maupun potensi daerah NTB. Pada tahun 2012, terdapat total 32 negara yang menjadi sumber investasi di NTB dari segi investasi asing (PMA) namun berdasarkan data dari BKPM PTSP Provinsi NTB, hanya 25 negara yang masih aktif menjalankan proyek dan menanamkan investasinya di NTB.

Tujuh negara lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan Provinsi NTB namun belum mengeluarkan nominal investasinya pada tahun 2012 yakni Denmark, Brazil, Belarus, RRC, Mongolia, Slovakia

dan Irlandia. Terlepas dari negara tersebut, beberapa negara seperti Inggris masih memiliki ikatan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB dan dengan signifikan menanamkan investasinya di NTB sejak tahun 1979. Sejauh ini, nominal investasi asing terbesar di NTB berasal dari Amerika Serikat dengan total nilai investasi sejak tahun 1986 sebesar US\$ 3.09 juta melalui 14 total proyek.²⁷ Rincian asal negara, jumlah investasi dan tahun investasi selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut ini.

²⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2013. *NTB Dalam Angka 2013*. Mataram, NTB. Melalui <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2013/>

Tabel 4.4 Negara Asal Investasi, Tahun Investasi dan Jumlah Proyek pada tahun 2012

NEGARA ASAL <i>Country of Origin</i>	TAHUN <i>Years</i>	Realisasi / <i>Realization</i>			
		Jumlah Proyek <i>Project</i>	Investasi <i>Investment</i> (Ribu US\$)	TKI <i>National Worker</i> (Orang)	TKA <i>Foreign Worker</i> (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. AUSTRALIA	1998-2012	34	15.068	397	32
2. INGGRIS	1979-2012	30	84.245	1.006	58
3. BELANDA	1996-2012	17	26.089	195	19
4. JEPANG	1986-2012	12	47.798	830	24
5. ITALIA	1999-2012	20	6.127	218	16
6. JERMAN	1999-2012	10	7.030	244	13
7. PERANCIS	2000-2012	15	779	39	3
8. SINGAPURA	1994-2012	13	48.843	1.259	24
9. BELGIA	1992-2012	12	2.192	97	7
10. AMERIKA	1986-2012	14	3.093.396	4.530	81
11. SWISS	2000-2012	2	8.288	227	5
12. SWEDIA	1996-2012	6	1.026	53	6
13. DENMARK	2005-2012	-	-	-	-
14. SPANYOL	2005-2012	3	750	12	-
15. PANAMA	1994-2012	1	1.045	84	1
16. INDIA	2001-2012	2	2.333	115	-
17. TAIWAN	1995-2012	1	200	4	-
18. BRAZIL	1998-2012	-	-	-	-
19. BELARUS	1999-2012	-	-	-	-
20. KANADA	2005-2012	2	340	16	-
21. MALAYSIA	2005-2012	1	10	1	-
22. SAUDI ARABIA	1999-2012	1	165	-	-
23. KOREA SELATAN	2007-2012	6	2.379	116	1
24. RRC	2008-2012	-	-	-	-
25. RUSIA	2008-2012	1	812	-	1
26. MONGOLIA	2006-2012	-	-	-	-
27. AFRIKA SELATAN	2009-2012	1	100	3	-
28. SLOVAKIA	2011-2012	-	-	-	-
29. SELANDIA BARU	2011-2012	1	650	8	1
30. IRLANDIA	2011-2012	-	-	-	-
31. MAURITIUS	2012	1	738	24	-
32. NEGARA GAB.	1992-2012	132	2.697.476	11.954	245
Jumlah / Total		338	6.047.877,25	21.432	537

Sumber : NTB Dalam Angka 2013 mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2013/>

Kemudian, bergerak pada investasi yang terjadi pada tahun 2013, pemerintah menargetkan investasi PMDN sebesar Rp. 223 miliar dan investasi PMA sebesar US\$ 11.4 juta Realisasi investasi pada tahun ini mencapai total nilai investasi sebesar Rp.4.91 triliun melalui keberadaan 317 perusahaan dengan 55 perusahaan dari segi PMDN dan 262 perusahaan dari segi PMA. Total nilai PMDN tahun 2013

mencapai hingga Rp. 1.53 triliun dengan capaian investasi PMA senilai US\$ 337.4 juta atau setara dengan Rp.3.37 triliun.²⁸ Angka ini dua kali lebih tinggi dari target investasi yang direncanakan, namun Pemerintah Provinsi NTB merasa realisasi investasi ini masih belum mampu memaksimalkan potensi daerah secara keseluruhan ditinjau dari banyaknya proyek yang dikembangkan oleh investor. Tabel di bawah ini akan menunjukkan capaian investasi baik PMDN maupun PMA serta realisasi tenaga kerja menurut sektor di NTB pada tahun 2013.

Tabel 4.5 Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja PMDN Menurut Sektor Ekonomi di NTB 2013

Sektor Ekonomi Economic Sector	Jumlah Proyek Project	Investasi Investment (Ribu Rp)	Tenaga Kerja Worker (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
I.PMDN/Domestic Investment	63	1 537 177 711 418	4 113
1.Pertanian Tanaman Pangan <i>Agriculture for Food Crops</i>	2	-	300
2.Perkebunan / <i>Estate</i>	2	-	5
3.Peternakan / <i>Livestock</i>	2	-	6
4.Perikanan / <i>Fishery</i>	6	25 397 453 744	516
5.Kehutanan / <i>Forestry</i>	2	-	150
6.Pertambangan / <i>Mining</i>	6	22 521 695 673	36
7.Industri / <i>Industry</i>	4	1 663 376 507	59
8.Pariwisata / <i>Tourism</i>	-	-	-
a.Perhotelan	18	136 137 141 609	1 345
b.Jasa Wisata	-	-	-
9.Perhubungan	4	1 331 073 524 709	130
10.Ketenagalistrikan	-	-	-
11.Jasa-jasa / <i>Services</i>	17	20 384 519 176	1 566
Sumber	: BKPM dan PT Prov. Nusa Tenggara Barat		
Source	: Investment Coord.Board & Integrated License Service		

Sumber : NTB Dalam Angka 2014 mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2014/>

²⁸ BKPM PTSP NTB. Realisasi investasi 2013. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/capaian-kinerja/realisasi-investasi#tahun-2013> diakses pada 1 Februari 2017.

Tabel 4.6 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor di NTB 2013

Sektor Ekonomi <i>Economic Sector</i>	Jumlah Proyek <i>Project</i>	Investasi <i>Investment</i> (Ribu US\$)	Tenaga Kerja <i>Worker</i> (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
II.PMA/Foreign Investment	372		10 873
1.Pertanian Tanaman Pangan <i>Agriculture for Food Crops</i>	2	-	52
2.Perkebunan / <i>Estate</i>	8	-	273
3.Peternakan / <i>Livestock</i>	-	-	-
4.Perikanan / <i>Fishery</i>	8	955 204	469
5.Kehutanan / <i>Forestry</i>	1	5 590 910	-
6.Pertambangan / <i>Mining</i>	19	311 900 685	4 501
7.Industri / <i>Industry</i>	8	630 000	497
8.Pariwisata / <i>Tourism</i>	-	-	-
a.Perhotelan	225	14 653 083	4 481
b.Jasa Wisata	-	-	-
9.Perhubungan	-	3 754 553	-
10.Ketenagalistrikan	101	-	600
11.Jasa-jasa / <i>Services</i>	-	-	-
Sumber	: BKPM dan PT Prov. Nusa Tenggara Barat		
Source	: <i>Investment Coord.Board & Integrated License Service</i>		

Sumber : NTB Dalam Angka 2014 mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2014/>

Sehubungan dengan realisasi investasi pada tahun 2013, dapat dianalisis bahwa lokasi investasi terbesar terletak di Kabupaten Sumbawa Barat dengan fokus usaha pada sektor pertambangan. Investasi di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2013 mencapai nilai sebesar US\$ 311.9 juta dan penggunaan tenaga kerja sebesar 4.276 jiwa. Posisi kedua diraih oleh Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun

ini, Kabupaten Lombok Barat mencapai angka yang cukup besar dalam penggunaan tenaga kerja yakni mencapai hingga 3.211 tenaga kerja.²⁹ Di bawah ini disajikan data yang berisi rincian realisasi investasi dan tenaga kerja PMA didasarkan kepada pembagian kabupaten/kota di NTB pada tahun 2013.

Tabel 4.7 Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja PMA Menurut Kabupaten/Kota di NTB 2013

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Proyek <i>Project</i>	Investasi <i>Investment (Ribu Rp.)</i>	Tenaga Kerja <i>Worker (orang)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	103	7 946 280,00	3 211
Lombok Tengah	67	830 820,00	746
Lombok Timur	20	-	470
Sumbawa	18	2 729 110,00	307
Dompu	4	-	633
Bima	1	-	187
Sumbawa Barat	8	311 900 685,00	4 276
Lombok Utara	109	8 261 640,00	740
Mataram	40	5 815 900,00	173
Kota Bima	2	-	30

Sumber : BKPM dan PT Prov. Nusa Tenggara Barat
 Source : Investment Coord.Board & Integrated License Service

Sumber : NTB Dalam Angka 2014 mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2014/>

²⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2014. NTB Dalam Angka 2014. CV.Harapan Mandiri Utama:Mataram, NTB. Melalui BAPPEDA Provinsi NTB. <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2014/> diakses pada 20 Maret 2017

Pada tahun 2013, investasi asing yang masuk ke wilayah Provinsi NTB sebagian besar berasal dari total 33 negara, namun terhitung hanya 11 negara yang secara signifikan menanamkan sahamnya di NTB. Negara tersebut yakni Australia, Belanda, Jepang, Singapura, Swiss, Swedia, Taiwan, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru dan sejumlah saham negara gabungan lainnya. Pada tahun 2013, Swiss merupakan negara yang menanamkan investasinya dalam jumlah yang paling besar di NTB dengan total nilai investasi sebesar US\$ 311.9 juta Berikut penulis lampirkan sejumlah data – data yang merincikan negara asal investasi, tahun investasi dan besarnya nilai investasi yang ditanamkan oleh investor asing di NTB pada tahun 2013.

Tabel 4.8 Negara Asal Investasi dan rincian investasi PMA tahun 2013

Negara Asal Country of Origin	Tahun Years	Realisasi / Realization			
		Jumlah	Investasi (Ribu US\$)	TKI (Orang)	TKA (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Australia	1996-2013		5 815 900		
2.Ingggris	1979-2013		-		
3.Belanda	1996-2013		3 200 000		
4.Jepang	1986-2013		836 820		
5.Italia	1999-2013		-		
6.Jerman	1999-2013		-		
7.Perancis	2000-2013		-		
8.Singapura	1994-2013		2 061 640		
9.Belgia	1992-2013		-		
10.Amerika	1986-2013		-		
11.Swiss	2000-2013		311 900 685		
12.Swedia	1996-2013		1 000 000		
13.Denmark	2005-2013		-		
14.Spanyol	2005-2013		-		
15.Panama	1994-2013		-		
16.India	2001-2013		-		
17.Taiwan	1995-2013		1 900 000		
18.Brazil	1996-2013		-		
19.Belarus	1999-2013		-		
20.Kanada	2005-2013		2 000 000		
21.Malaysia	2005-2013		-		
22.Arab Saudi	1999-2013		-		
23.Korea Selatan	2007-2013		2 729 110		
24.RRC	2006-2013		-		
25.Rusia	2006-2013		-		

Sumber : BKPM dan PT Prov. Nusa Tenggara Barat
Source : Investment Coord.Board & Integrated License Service

Sumber : NTB Dalam Angka 2014 mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2014/>

Tabel 4.9 Tabel lanjutan mengenai negara asal investasi dan rincian investasi PMA 2013

Negara Asal Country of Origin	Tahun Years	Realisasi / Realization			
		Jumlah	Investasi (Ribu US\$)	TKI (Orang)	TKA (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.Hungaria	2006-2013		-		
27.Afrika Selatan	2009-2013		-		
28.Slovakia	2011-2013		-		
29.Selandia Baru	2011-2013		2 040 280		
30.Irlandia	2011-2013		-		
31.Mauritius	2012-2013		-		
32.Negara Gab.	1992-2013		4 000 000		
33.Bulgaria	1992-2013		-		
Jumlah/Total			- 337 484 435	-	-
Sumber		: BKPM dan PT Prov. Nusa Tenggara Barat			
Source		: Investment Coord.Board & Integrated License Service			

Sumber : NTB Dalam Angka 2014 mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2014/>

Untuk membandingkan capaian realisasi investasi di NTB setiap tahunnya, berikut penulis sajikan tabel komparatif yang menyajikan data – data pembanding capaian realisasi investasi di NTB baik PMDN maupun PMA sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 yang merupakan data dari BKPM PTSP Provinsi NTB.³⁰

³⁰ BKPM PTSP NTB. Kinerja Investasi. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/kinerja-investasi#6-tahun-2008-2013> diakses pada 20 Maret 2017.

Tabel 4.10 Realisasi Investasi PMDN/PMA di NTB sejak 2008 – 2013

URAIAN	TAHUN					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PMDN <i>(Rp.000)</i>	695.000.000	749.936.490	195.025.950	160.596.385	738.608.218	1.537.177.711
PMA <i>(US\$.000)</i>	44.062	56.757	145.688	164.575,69	115.447,25	337.484,44
*) Dalam <i>(Rp.000)</i>	396.558.000	510.813.000	1.311.192.000	1.481.181.183	1.039.025.250	3.374.844.430
Total PMDN + PMA <i>(Rp.000)</i>	1.091.558.000	1.260.749.490	1.506.217.950	1.641.777.568	1.777.633.468	4.912.022.141

Sumber : BKPM PTSP Provinsi NTB, dari <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/kinerja-investasi#6-tahun-2008-2013>

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terjadi penurunan realisasi investasi PMA pada tahun 2012 yang lebih kecil dari capaian PMA pada dua tahun sebelumnya yakni 2010 dan 2011. PMA pada tahun 2012 hanya mampu meraih US\$ 115 miliar sedangkan pada 2010 PMA yang berhasil dicapai sebesar US\$ 145 miliar dan US\$ 164 miliar pada tahun 2011. Realisasi investasi dari segi PMDN juga mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012 dibandingkan dengan capaian investasi sejak 2008 hingga 2010.

Kemudian terlepas dari penurunan tersebut, pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi NTB lalu kembali menargetkan investasi dalam negeri (PMDN) dapat menembus angka Rp.1.63 triliun dan investasi

asing (PMA) ditargetkan mencapai US\$ 3.7 juta. Dalam perkembangannya, realisasi investasi di NTB pada tahun 2014 memang mengalami peningkatan dengan total nilai investasi sebesar Rp.6.22 triliun. Namun sayangnya, investasi PMDN pada tahun 2014 ini tidak mencapai target yang dicanangkan sebelumnya dengan hanya dapat mencapai nilai investasi PMDN sebesar Rp.1.35 triliun. Di sisi lain, investasi asing (PMA) mampu melampaui target yang dicanangkan oleh pemerintah daerah melalui perolehan nilai investasi asing (PMA) sebesar US\$ 487.8 juta atau setara dengan Rp.4.87 triliun.³¹ Namun angka ini hanya mengalami peningkatan dengan tingkat yang cukup sedikit dengan perolehan tahun lalu yang mencapai US\$ 337 juta.

Secara rinci, dapat diketahui bahwa dari segi PMDN, nilai investasi terbesar dicapai pada sektor perhotelan, perhubungan dan industri. Penyerapan tenaga kerja pada investasi PMDN mencapai angka hingga 2.365 pekerja. Dari segi PMA, investasi terbesar berada pada sektor pertambangan, pariwisata dan ketenagalistrikan. PMA pada tahun 2014 menyerap tenaga kerja sebanyak 17.960 pekerja.³² Namun masih sama seperti tahun – tahun sebelumnya, proyek – proyek investasi pada sejumlah sektor di NTB tercatat masih sangat minim. Bahkan pada beberapa sektor, tidak terdapat satupun proyek investasi yang menanamkan modal secara signifikan. Berikut dilampirkan data realisasi investasi menurut sektor ekonomi di NTB pada tahun 2014 :

³¹ BKPM PTSP NTB. Realisasi investasi 2014. <http://bkpm-ptsp.ntbprov.go.id/index.php/capaian-kinerja/realisasi-investasi#tahun-2014> diakses pada 1 Februari 2017.

³² Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2015. *NTB Dalam Data 2015*. CV.Harapan Mandiri Utama:Mataram, NTB melalui BPS NTB. dari <http://ntb.bps.go.id/ntb-dalam-angka-2015/> diakses pada 20 Maret 2017

Tabel 4.11 Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja PMDN Menurut Sektor Ekonomi di NTB 2014

Sektor Ekonomi Economic Sektor	Jumlah Proyek Project Number	Investasi Investment (Rp)	Tenaga Kerja Worker (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PMDN/Domestic Investment	66	1.350.586.547.701	2.365
1. Pertanian Tanaman Pangan	0	0	0
2. Perkebunan	4	172.503.143.523	66
3. Peternakan	4	0	0
4. Perikanan	4	12.519.502.900	240
5. Kehutanan	3	4.000.000.000	1.564
6. Pertambangan	4	72.051.902.449	75
7. Industri	6	322.966.839.368	150
8. Pariwisata	0	0	0
a. Perhotelan	21	347.186.424.641	175
b. Jasa Wisata	0	0	0
9. Perhubungan	4	326.902.295.617	0
10. Ketenagalistrikan	0	0	0
11. Jasa-jasa	10	62.153.130.325	70

Sumber : NTB Dalam Angka 2015 mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://ntb.bps.go.id/ntb-dalam-angka-2015/>

Tabel 4.12 Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja di NTB Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2014

Sektor Ekonomi Economic Sektor	Jumlah Proyek Project Number	Investasi Investment (US\$)	Tenaga Kerja Worker (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
II. PMA/Foreign Investment	541	487.838.152	17.960
1. Pertanian Tanaman Pangan	0	0	0
2. Perkebunan	2	945.610	246
3. Peternakan	0	0	0
4. Perikanan	4	2.500.000	374
5. Kehutanan	0	0	0
6. Pertambangan	5	169.230.425	10.027
7. Industri	14	4.492.500	500
8. Pariwisata	0	0	0
a. Perhotelan	430	165.653.246	6.538
b. Jasa Wisata	0	0	0
9. Perhubungan	0	0	0
10. Ketenagalistrikan	82	143.159.494	250
11. Jasa-jasa	4	1.856.877	25

Sumber : NTB Dalam Angka 2015 mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://ntb.bps.go.id/ntb-dalam-angka-2015/>

Dari 33 negara mitra investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, hanya 32 negara yang secara signifikan menjalankan sejumlah proyek investasi di NTB, Bulgaria pada tahun ini tidak mengucurkan dana investasi yang signifikan jika mengacu pada data dari BKPM PTSP Provinsi NTB. Namun dari total angka tersebut, negara yang mengucurkan sahamnya pada tahun 2014 hanya sebanyak 16 negara. Saham yang berasal dari negara – negara gabungan memperoleh nilai tertinggi dengan mengeluarkan investasi sebesar US\$ 303.4 juta melalui 365 total proyek. Investasi terbesar selanjutnya berasal dari negara Australia dan Malaysia. Di bawah ini dilampirkan tabel berisi rincian negara asal investasi beserta nominal dan total proyek yang direalisasikan di NTB pada tahun 2014.

Tabel 4.13 Negara Asal Investasi PMA di NTB 2014

Negara Asal <i>Origin of Country</i>	Tahun <i>Years</i>	Realisasi/Realization			
		Jumlah	Investasi <i>(US\$)</i>	TKI <i>(Orang)</i>	TKA <i>(Orang)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Australia	1998-2013	21	115.995.436	-	10
2 Inggris	1979-2013	15	-	-	-
3 Belanda	1996-2013	10	20.675	-	5
4 Jepang	1986-2013	12	5.087	-	3
5 Italia	1999-2013	6	210.000	-	-
6 Jerman	1999-2013	5	-	-	-
7 Perancis	2000-2013	18	-	-	-
8 Singapura	1994-2013	19	3.810.850	5	1
9 Belgia	1992-2013	5	21.925	-	1
10 Amerika	1986-2013	4	52.467.850	-	4
11 Swiss	2000-2013	6	79.800	-	2
12 Swedia	1996-2013	2	375	-	1
13 Denmark	2005-2013	5	-	-	-
14 Spanyol	2005-2013	5	-	-	-
15 Panama	1994-2013	2	-	-	-
16 India	2001-2013	4	-	-	-
17 Taiwan	1995-2013	1	-	-	-

Sumber : NTB Dalam Angka 2015 mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://ntb.bps.go.id/ntb-dalam-angka-2015/>

Tabel 4.14 Lanjutan Negara Asal Investasi PMA di NTB 2014

Negara Asal <i>Origin of Country</i>	Tahun <i>Years</i>	Realisasi/Realization			
		Jumlah	Investasi (US\$)	TKI (Orang)	TKA (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18 Brazil	1998-2013	2	0	0	-
19 Belarus	1999-2013	4	7.500	0	1
20 Kanada	2005-2013	2	0	0	-
21 Malaysia	2005-2013	3	1.642.100	0	2
22 Arab Saudi	1999-2013	2	0	0	-
23 Korea Selatan	2007-2013	8	155.645	0	4
24 RRC	2008-2013	3	0	0	-
25 Rusia	2008-2013	1	455.250	0	-
26 Hungaria	2006-2013	2	1.100	0	-
27 Afrika Selatan	2009-2013	2	0	0	-
28 Slovakia	2011-2013	2	3.000	0	1
29 Selandia Baru	2011-2013	2	0	0	-
30 Iriandia	2011-2013	1	0	0	-
31 Mauritius	2012-2013	1	1	0	-
32 Negara Gab	1992-2013	365	303.408.021	0	191
33 Bulgaria	1992-2013	0	0	0	0

Sumber : *NTB Dalam Angka 2015* mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://ntb.bps.go.id/ntb-dalam-angka-2015/>

Mengacu pada tahun – tahun sebelumnya yang menyajikan data perbandingan realisasi investasi di NTB, pada tahun 2014 penulis kemudian menyajikan data komparatif dalam bentuk tabel yang menunjukkan rincian data realisasi investasi di NTB sejak tahun 2005 hingga tahun 2014 dengan detail berisi jumlah proyek yang dilakukan,

nilai investasi maupun jumlah tenaga kerja asal Indonesia maupun tenaga kerja asing yang dilibatkan.

Tabel 4.15 Realisasi Investasi PMA di NTB sejak 2005 - 2014

Tahun Years	Realisasi/Realization			
	Jumlah Proyek	Investasi (US\$.)	TKI (Orang)	TKA (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	114	487.838.152	17.234	226
2013	12	1.537.177.711	4.103	10
2012	61	115.447	5.482	131
2011	71	179.245	5.308	95
2010	79	2.552.426	595	-
2009	37	8.126	259	-
2008	3	1.037	16	2
2007	4	852	16	5
2006	5	9.871	380	1
2005	11	9.233	528	14

Sumber : NTB Dalam Angka 2015 mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://ntb.bps.go.id/ntb-dalam-angka-2015/>

Berdasarkan tabel komparatif di atas dapat dianalisis bahwa sejak tahun 2005 menuju 2006, terjadi peningkatan realisasi investasi yang bergerak hanya sedikit selama satu tahun. Pada tahun 2007 justru terjadi kejatuhan drastis pada capaian investasi asing di NTB yang ditunjukkan dengan menurunnya realisasi PMA dari US\$ 9.8 juta menjadi hanya US\$ 852 saja. Penurunan paling drastis juga dideteksi terjadi pada tahun 2011 yang mengalami penurunan investasi PMA dibandingkan dengan perolehan pada tahun 2010. Pada tahun 2010 PMA di NTB mencapai US\$ 2.5 juta namun sayangnya PMA yang berhasil di raih pada tahun 2011 hanya sebesar US\$ 179 ribu saja.

Dinamika iklim investasi yang kerap mengalami penurunan dan stagnasi ini kemudian menjadi salah satu faktor pendorong penting yang dipertimbangkan Pemerintah Provinsi NTB untuk membentuk kebijakan – kebijakan baru guna meningkatkan investasi di NTB. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubbag Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, Muhammad Suaidi SE, pemerintah daerah meyakini bahwa realisasi investasi yang dicapai di NTB selama beberapa tahun terakhir belum mampu memaksimalkan potensi daerah yang ada di NTB hingga titik optimumnya.

Sejak tahun 2012, 2013 dan 2014, memang terjadi peningkatan secara signifikan terhadap investasi di NTB secara keseluruhan, namun pada kategori dan sektor – sektor tertentu terutama pada PMA, investasi di NTB cenderung mengalami stagnasi dan beberapa kali penurunan ditandai dengan jatuhnya realisasi investasi atau bahkan terjadi peningkatan namun hanya sebatas keberhasilan untuk meraih target investasi nasional dan RPJMD semata. Pada tahun – tahun tersebut, angka realisasi investasi di NTB belum dapat digolongkan sebagai kategori capaian maksimum.

B. Faktor Eksternal Terbentuknya Kebijakan Peningkatan Investasi di NTB

1. Dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Faktor eksternal yang mendorong terbentuknya kebijakan peningkatan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah mulai dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak tahun

2015. Dilaksanakannya MEA memberi tuntutan tersendiri bagi setiap pemerintah daerah di Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan reformasi dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan – kebijakan maupun aturan daerah yang berpotensi menghambat masuknya investasi. Hal ini perlu dilakukan guna meningkatkan kesiapan daerah untuk menghadapi dan berkompetisi dalam MEA. Arus MEA yang sangat kuat membutuhkan persiapan matang dan keunggulan daerah agar dapat melawan deras arus kompetisi negara – negara ASEAN.³³

Oleh karena itulah, Pemerintah Provinsi NTB kemudian mulai membentuk kebijakan daerah tertulis yang dituangkan dalam sejumlah perda seperti perda penanaman modal yang memberikan aturan baku terkait dengan investasi karena cakupannya merangkul seluruh aspek baik mengenai tata cara, kewenangan, prosedur hingga pemberian jaminan maupun kepastian hukum bagi investasi di NTB. Pemerintah NTB juga menerbitkan perda mengenai percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis guna menyiapkan sektor infrastruktur di NTB agar mampu bersaing menghadapi arus MEA. Tak hanya itu, upaya mengkonduksikan investasi juga dilakukan dengan adanya kemudahan – kemudahan investasi melalui pemberian insentif kemudahan pajak dan retribusi daerah yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi melalui pembentukan Perda nomor 8 tahun 2016 bagi investor yang menanamkan modalnya di KEK Mandalika. Perda ini dibentuk sebagai upaya reformasi atas aturan – aturan perpajakan yang memberatkan dan membebani investor.

³³ BKPM RI. 2001. *Pertumbuhan Investasi Asing*. Jakarta

Pada era diterapkannya MEA, keberadaan KEK Mandalika merupakan kunci penting yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB untuk dapat berkompetisi dengan wilayah lainnya maupun negara ASEAN dalam pasar terintegrasi dan pasar bebas MEA. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB, Ibu Siti Hadijah SH, MH menegaskan bahwa potensi dan keistimewaan yang terdapat di KEK Mandalika harus dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan daerah dan masyarakat setempat, terutama dalam hal perbaikan ekonomi melalui keberadaan investasi. Oleh karena pertimbangan tersebutlah Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan sejumlah kebijakan peningkatan investasi termasuk dengan menerbitkan perda nomor 8 tahun 2016.³⁴ Untuk menghadapi dan bertahan dalam MEA, pemerintah daerah terutama dituntut untuk memiliki kesiapan terutama dalam bentuk kebijakan yang pro investasi.

Pembentukan sejumlah kebijakan daerah untuk meningkatkan investasi di NTB terutama pada tahun 2015 merupakan salah satu bentuk respon segera pemerintah daerah yang bergerak cepat untuk menyiapkan diri menghadapi MEA. Kebijakan yang dibentuk setelah tahun 2015 juga merupakan bentuk antisipasi maupun evaluasi pemerintah daerah terhadap berjalannya MEA yang dimulai sejak 31 Desember 2015.

Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan bahwa pembentukan aturan tersebut adalah bentuk nyata dari kesiapan pemerintah daerah untuk masuk di pasar bebas ASEAN. Untuk

³⁴ Siti Hadijah, SH, MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. "wawancara". 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

memasuki pasar bebas dan terintegrasi ASEAN, pemerintah daerah harus kompetitif dan berdaya saing. Pemerintah Provinsi NTB bahkan mengklaim tidak ingin sekedar menjadi objek dalam pasar bebas ASEAN ataupun hanya dapat memantau pergerakan pasar secara pasif.

Melalui pembentukan sejumlah aturan yang pro investasi ini, Pemerintah Provinsi NTB ingin menjadi bagian dari pasar bebas dan terintegrasi ASEAN sebagai subjek aktif yang memainkan peran penting sehingga dapat berkompetisi secara sportif dengan wilayah lainnya baik dalam skala nasional maupun internasional.³⁵

Upaya – upaya ini dilakukan dengan peningkatan daya saing ekonomi dan mengkonduksifkan iklim investasi di daerah dengan memaksimalkan promosi daerah dan kemudahan layanan perizinan sehingga investor berminat untuk menanamkan sahamnya di NTB. Selain itu, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di daerah. Analisis kekuatan dan kelemahan serta evaluasi kebijakan terus dilakukan pemerintah setiap tahunnya agar terus bisa berinovasi dan memanfaatkan peluang investasi di daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing dan menarik investor masuk ke NTB.

Kepala daerah bahkan dituntut aktif dan membuka peluang investasi sebesar – besarnya di daerah.³⁶ Hal ini juga dilakukan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, TGH. Muhammad Zainul Majdi. Dalam data yang disebutkan sejumlah surat kabar, Gubernur

³⁵ DPD RI. Kesiapan daerah menghadapi MEA. <http://www.dpd.go.id/artikel-kesiapan-daerah-menghadapi-mea-harus-serius> diakses pada 20 Mei 2017.

³⁶ Crms Indonesia. Peluang dan Tantangan MEA. <http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi> diakses pada 20 Mei 2017.

NTB kerap kali dikabarkan melakukan “jemput bola” bagi investor yang menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di NTB. Hal ini bahkan dibuktikan dengan tindakan Gubernur NTB yang datang berkunjung dan bertemu langsung dengan Presiden *Islamic Development Bank* (IDB), Ahmad Mohamad Ali Mohamad Hedi Mejai di Jeddah, Arab Saudi pada 29 Januari 2016 silam.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB secara langsung mempromosikan keunggulan dan potensi daerah di NTB dengan prospek bahwa kedepannya IDB akan memberikan kontribusi pembangunan di NTB. Gubernur NTB bahkan secara langsung menyatakan dalam sejumlah kesempatan di surat kabar bahwa untuk menghadapi arus MEA, dibutuhkan kegigihan dan kerja keras daerah untuk mempromosikan potensi dan keunggulannya, sehingga investor dapat masuk ke daerah untuk berinvestasi.

Strategi – strategi harus terus dibentuk pemerintah daerah untuk terus dapat berkompetisi di pesatnya perkembangan pasar bebas MEA. Terbentuknya pasar tunggal MEA membuka peluang yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah karena arus investasi terutama investasi asing dapat dengan mudah masuk ke daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan peluang ekonomi dan investasi ini dengan baik melalui pembentukan kebijakan yang pro investasi. Kedepannya iklim investasi diharapkan dapat semakin kondusif dan menguntungkan bagi pembangunan daerah.

Pada dasarnya, MEA mengintegrasikan perekonomian di ASEAN dengan membentuk dan memberlakukan sistem perdagangan bebas diantara negara anggotanya. MEA dalam hal ini dibentuk dengan

berlandaskan pada empat point utama yakni upaya membuat ASEAN menjadi pasar tunggal dan pusat produksi, upaya menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing, sebagai bentuk upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan seimbang serta sebagai upaya untuk mengintegrasikan pasar ASEAN ke dalam cakupan ekonomi global.³⁷ Upaya ini diwujudkan dengan membebaskan penerapan sejumlah aspek baik investasi, modal maupun tenaga kerja dari dan menuju negara – negara di ASEAN. Batas – batas territorial akan melebur dan terintegrasi menjadi satu kesatuan yakni dalam pasar tunggal ASEAN.

Sehingga dalam hal ini, terbentuknya pasar tunggal ASEAN melalui MEA akan menyebabkan semakin bebas dan pesatnya pergerakan arus barang dan jasa yang masuk maupun keluar dalam suatu negara. MEA dibentuk dengan tujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan standar hidup masyarakat dan peningkatan daya saing kawasan. Dengan diberlakukannya MEA, maka ASEAN sebagai pusat dari kawasan ekonomi yang direncanakan akan menjadi kawasan ekonomi yang sangat kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi dan persaingan yang terus menerus.³⁸ Setiap daerah termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat juga akan terintegrasi secara menyeluruh ke dalam ekonomi global.

³⁷ Kementerian Luar Negeri RI. MEA. [http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-\(MEA\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-(MEA).aspx) diakses pada 20 Mei 2017.

³⁸ Media Indonesia. Menghadapi MEA daerah dituntut mandiri. <http://www.mediaindonesia.com/news/read/8342/menghadapi-mea-daerah-dituntut-mandiri-dan-bersaing/2015-10-22> diakses pada 20 Mei 2017.

MEA memiliki *dual effect* yang cukup berpengaruh bagi aktor – aktor yang terlibat di dalamnya.³⁹ Dipertimbangkan dari aspek positifnya, MEA akan memberikan dampak baik dari segi perdagangan karena hambatan perdagangan akan berkurang sehingga daerah – daerah dapat memaksimalkan pemasaran produk daerah ke luar Indonesia secara leluasa. Dari segi investasi, investasi asing juga dapat dengan mudah masuk ke daerah yang akan berdampak pada terbentuknya lapangan kerja baru yang berperan besar dalam upaya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat di daerah. Masuknya investasi ke daerah secara tidak langsung akan memicu meningkatnya angka konsumsi dan mengalirnya peredaran uang ke daerah.

Namun jika dipertimbangkan dari aspek negatifnya, MEA memiliki sejumlah efek yang cukup membahayakan terutama bagi daerah yang kurang memiliki kesiapan dan antisipasi dalam bersaing di era MEA. Derasnya arus kompetisi yang masuk ke daerah dapat mengancam industri maupun produk lokal yang tidak dapat bersaing karena kelemahan dari segi harga maupun kualitas yang menyebabkan minimnya permintaan pasar. Dalam era MEA, persaingan antara negara maupun daerah akan menjadi semakin sengit. Oleh karena itu, perangkat pemerintah daerah di dorong untuk membentuk aturan yang pro investasi agar daerah dapat bersaing di tengah derasnya arus kompetisi MEA.⁴⁰

³⁹ National Geographic. MEA 2015. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/pahami-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015#> diakses pada 20 Mei 2017.

⁴⁰ Kompasiana. Strategi menghadapi MEA. http://www.kompasiana.com/isnenharahap/strategi-msdm-menghadapi-mea_57264988b27e61090b031e9a diakses pada 20 Mei 2017.

2. Adanya permohonan dari investor asing agar pemerintah daerah memberikan ruang dan kemudahan berinvestasi di NTB.

Faktor eksternal selanjutnya yang cukup memberi pengaruh penting dan mendorong terbentuknya kebijakan peningkatan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah adanya permohonan dari investor asing agar pemerintah daerah memberikan ruang dan kemudahan berinvestasi di NTB dengan melakukan peninjauan kembali terhadap aturan – aturan daerah yang tidak ramah investor. Aturan – aturan tersebut berupa rumitnya proses perizinan investasi sebelum tahun 2015, banyaknya biaya administrasi yang dikeluarkan investor dalam hal prosedur perizinan, beragam tarif yang cukup membebani investor hingga minimnya fasilitas infrastruktur di NTB baik sarana prasarana seperti jalan dan jembatan hingga minimnya kapasitas listrik.⁴¹

Dalam menyampaikan permohonan ini, investor – investor kerap kali melakukannya dengan dua tipe konsultasi yakni dengan perseorangan melalui tatap muka secara langsung dan tertutup dengan Gubernur Provinsi NTB maupun secara kolektif melalui forum komunikasi investasi dengan menyampaikan surat permohonan resmi kepada pemerintah daerah guna mengadakan rapat/pertemuan untuk membahas peluang investasi dan penyampaian permohonan – permohonan terkait investasi.

Untuk permohonan yang disampaikan perseorangan kepada Gubernur, mekanisme permohonannya diproses setelah Gubernur

⁴¹ Siti Hadijah, SH. MH. Kasubbag Rancangan Perda Biro Hukum Provinsi NTB. “*wawancara*”. 14 Maret 2017. Biro Hukum Kantor Gubernur NTB.

menyampaikan disposisi untuk segera mengadakan pertemuan dan mengundang perangkat daerah terkait baik BKPM PTSP maupun biro hukum ataupun badan – badang sektor investasi yang terlibat guna membahas permohonan investasi yang dimohonkan oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah investor.

Sedangkan untuk permohonan yang disampaikan secara kolektif dengan mengirimkan surat permohonan kepada BKPM PTSP NTB, permohonan tersebut diproses BKPM PTSP dengan memfasilitasi sebuah pertemuan guna membahas permohonan investasi pihak ketiga tersebut. Pada saat rapat tersebut, investor umumnya menyampaikan permohonannya seperti adanya permohonan untuk mempermudah proses pengurusan perizinan investasi di NTB hingga adanya permohonan kemudahan pajak dan retribusi di daerah yang dianggap cukup membebani bagi investor.

Selain itu, hal yang kerap kali dikeluhkan investor adalah rumitnya perizinan lahan dan kerap kali terjadinya sengketa tanah di letak koordinat lahan yang dimohonkan oleh investor. Pada beberapa kasus, banyak lokasi investasi yang dimohonkan oleh investor berbenturan dengan aturan zona pemanfaatan ruang kawasan (RTRWP) dan persyaratan kawasan berbasis lingkungan (KLHS). Dalam kasus ini, investor terutama investor asing yang memiliki saham cukup besar di NTB memiliki andil yang cukup besar bahkan berperan langsung dalam pembentukan perda penanaman modal nomor 3 tahun 2015.

Selanjutnya, permohonan – permohonan investor yang dalam istilah ilmu politik lebih dikenal sebagai lobi politik tersebut kemudian ditampung, ditinjau kembali dan dipertimbangkan dalam pembahasan

lanjutan di tingkat perangkat yang lebih tinggi yakni setingkat sekretaris daerah (sekda) maupun asisten. Hasil peninjauan tersebut kemudian di proses dan masuk ke dalam tahapan kajian terhadap berbagai aspek dan sektor yang dipengaruhinya. Dalam perkembangannya, Gubernur kemudian mendisposisikan BKPM PTSP untuk mengambil langkah cepat guna menggagas aturan/kebijakan daerah terkait investasi dengan mempertimbangkan masukan dan permohonan dari berbagai pihak termasuk dari kalangan investor yang sebelumnya telah mengadakan rapat pembahasan dengan pemerintah daerah untuk meminta adanya kemudahan dalam perizinan investasi dan kemudahan pajak serta retribusi daerah di NTB.

Langkah selanjutnya yakni regulasi dibentuk BKPM PTSP dengan melakukan konsultasi kepada biro hukum di tingkat provinsi. Perda yang telah disusun kemudian memasuki tahapan uji publik dengan mengundang kembali sejumlah investor sebagai praktisi yang berpengaruh langsung di lapangan.

Investor dilibatkan dalam tahapan ini karena kebutuhan pemerintah daerah untuk mendengar langsung tanggapan investor sebagai subjek sekaligus objek utama dari aturan terkait investasi yang akan dibentuk. Pasca dilakukan uji publik, kebijakan yang sedang dalam proses pembentukan kemudian masuk ke tahap pembahasan di DPR dan dilakukan konsultasi dengan pemerintah pusat melalui kemendagri. Setelah proses ini selesai, maka aturan tersebut telah resmi terbentuk menjadi perda yang baru. Dalam kasus ini, gambaran proses panjang di atas adalah alur yang dilalui pada saat pembentukan perda penanaman modal.

Terbentuknya perda penanaman modal di Provinsi NTB tak terlepas dari besarnya pengaruh investor terutama investor asing yang sudah maupun akan menanamkan modalnya di NTB. Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubbag Perencanaan Dinas Penanaman Modal PTSP NTB, Muhammad Suaidi, SE, disebutkan bahwa investor yang paling sering menyampaikan permohonannya berasal dari investasi di sektor pariwisata, perdagangan, pertambangan, kesehatan hingga perumahan dan permukiman rakyat. Banyaknya aturan yang menghambat investasi sebelum tahun 2015 kerap kali menyebabkan investor berpikir dua kali untuk menanamkan investasinya di NTB.⁴²

Investor – investor asing yang membawa modal besar untuk ditanamkan di NTB juga mempertimbangkan rumitnya proses birokrasi dan lemahnya jaminan kepastian hukum di NTB. Oleh karena itu, lobi – lobi politik kemudian dilakukan oleh sejumlah investor asing tersebut agar pemerintah daerah kedepannya lebih mengakomodir kebutuhan industri dan investasi di daerah melalui pembentukan perda yang ramah investasi dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor yang menanamkan modalnya di NTB.⁴³

Hingga saat ini, data BKPM PTSP NTB mencatat terdapat 23 negara yang menjadi asal investasi asing di NTB pada tahun 2015. Dari 23 negara tersebut, Amerika Serikat merupakan negara yang menanamkan investasi terbesarnya di NTB melalui keberadaan PT

⁴² Muhammad Suaidi, SE. Kasubbag Perencanaan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPM PT) Provinsi NTB. “wawancara”. 14 Maret 2017. BKPM PTSP NTB.

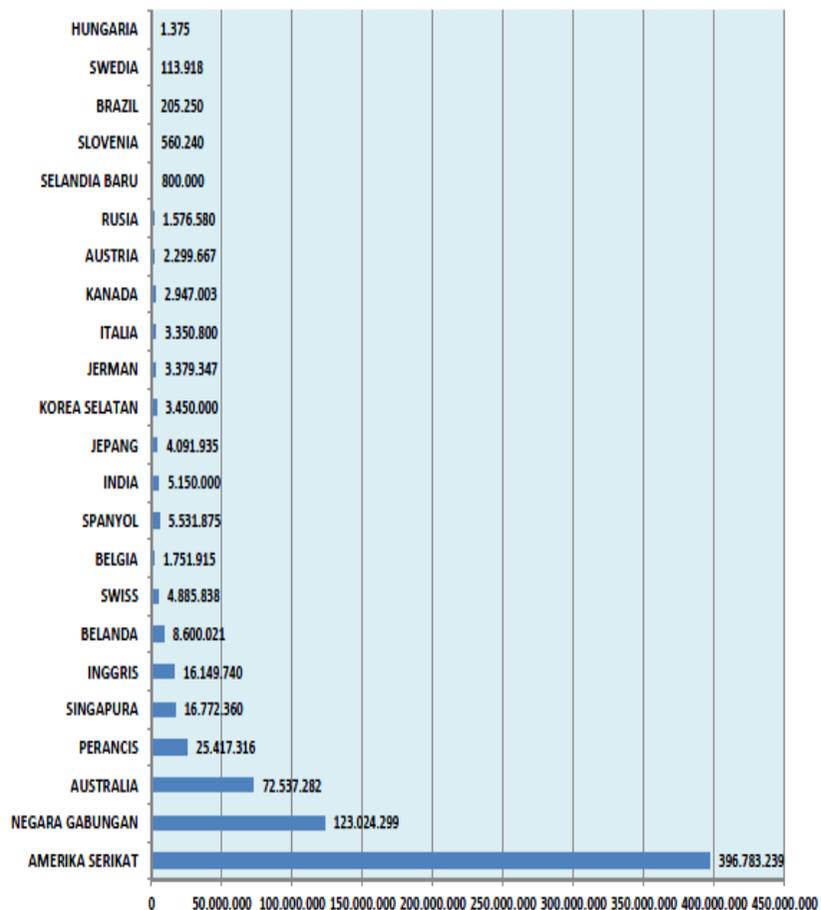
⁴³ Suara NTB. Ekonomi. Headline. <http://www.suarantb.com/news/2017/02/27/25299/temui.tgb.investor.arab.saudi.tertarik.investasi.wisata.halal.di.ntb> diakses pada 20 Mei 2017.

Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang melakukan operasi tambang mineral di Kabupaten Sumbawa Barat. Nilai investasi yang ditanamkan Amerika Serikat di NTB mencapai hingga sebesar US\$ 396 juta.⁴⁴ Saham kedua terbesar berasal dari modal yang ditanamkan negara – negara gabungan lalu diikuti oleh Australia dan Perancis. Tabel di bawah ini akan merincikan realisasi investasi di NTB pada tahun 2015 berdasarkan asal negaranya.

⁴⁴ Radar Lombok. Perusahaan AS berinvestasi di NTB. <http://www.radarlombok.co.id/banyak-perusahaan-amerika-akan-berinvestasi-di-ntb.html> diakses pada 20 Mei 2017.

Tabel 4.16 Tabel Realisasi Investasi 2015 Berdasarkan asal negara

REALISASI INVESTASI JANUARI – DESEMBER TAHUN 2015 BERDASARKAN NEGARA ASAL (US\$.)



Sumber : NTB Dalam Angka 2016 mengutip data BKPM PT NTB, dari <http://ntb.bps.go.id/ntb-dalam-angka-2016/>

Diperlakukannya permohonan investor sebagai bahan pertimbangan penting oleh pemerintah daerah dalam hal pembentukan aturan terkait investasi tak terlepas dari besarnya modal yang sudah ditanamkan atau akan ditanamkan investor di suatu daerah. Nantinya

modal – modal tersebut sangat dibutuhkan daerah guna melakukan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui terbukanya lapangan – lapangan kerja baru yang mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.

Daerah Lombok Barat pada khususnya, dikutip melalui sejumlah surat kabar bahkan mengklaim membutuhkan dana investasi sekitar Rp. 10 triliun guna membangun infrastruktur di kabupaten tersebut agar dapat memfasilitasi kebutuhan dunia usaha dan investasi.⁴⁵ Pertimbangan – pertimbangan seperti inilah yang kemudian membuat investor terutama investor asing memiliki andil yang cukup besar bagi terbentuknya kebijakan daerah yang pro investasi.

Dalam perkembangannya, Gubernur Nusa Tenggara Barat juga menghimbau kepada seluruh perangkat daerah untuk membudayakan sikap ramah dalam manajemen pengelolaan investasi di segala sektor termasuk di sektor pariwisata. Keramahtamahan di segala sektor harus dilakukan terutama di sektor birokrasi dengan menciptakan layanan yang baik dan pro investasi guna menarik investor masuk ke daerah. Oleh karena itulah, banyak investor asing kerap kali mengadakan pertemuan perseorangan langsung dengan Gubernur NTB dan melakukan pembahasan dalam banyak hal terkait investasi.

Baru – baru ini tepatnya pada Februari 2017, Gubernur NTB diberitakan oleh surat kabar Suara NTB bahkan menerima kunjungan rombongan investor Arab Saudi yang dipimpin oleh Dr. Hassan Saeed Bugis. Kedatangan rombongan investor tersebut dilansir terkait dengan

⁴⁵ Kompas Nasional. Bangun Infrastruktur, Lombok Barat butuh 10 triliun. <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/111500926/bangun.infrastruktur.lombok.barat.butuh.investasi.rp.10.triliun> diakses pada 20 Mei 2017

ketertarikan mereka untuk menanamkan investasi sehubungan dengan wisata halal dunia di NTB yang mulai disandang daerah tersebut sejak beberapa tahun silam.⁴⁶

⁴⁶ Suara NTB. Ekonomi. Headline. <http://www.suarantb.com/news/2017/02/27/25299/temui.tgb.investor.arab.saudi.tertarik.investasi.wisata.halal.di.ntb> diakses pada 20 Mei 2017.